

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG**

TAHUN 2019

Kata PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019. LKIP SKPD ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama masa satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sumedang, 3 Januari 2020

Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumedang



Ir. H. AMIM, MM
NIP. 19620909 199202 1 001

DAFTAR ISI

BAB	URAIAN	Hal
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
I	PENDAHULUAN	
	1.1 Gambaran Umum	1
	1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
	1.3 Struktur Organisasi	5
	1.4 Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7
	1.5 Sistematika Penulisan	19
II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	2.1. Rencana Strategis	21
	2.1.1. Visi dan Misi	21
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	22
	2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	23
	2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	28
	2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	30
	2.4. Standar Kepuasan Masyarakat	31
	2.5. Kriteria Pencapaian Indikator.....	33
III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	35
	3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	36
	A. Sasaran Strategis 1	36
	B. Sasaran Strategis 2	39
	3.3. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan	40
	3.4. Realisasi Anggaran	49
IV	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	53
	5.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja di masa mendatang.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dengan pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama

tahun 2019, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Di samping itu, LKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sumedang serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan,
- b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang,
- c) menyusun Penetapan Kinerja,
- d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul,
- e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama,
- f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/ target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta
- g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2019 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2019-2023. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan

pembaharuan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/ hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 disusun sebagai acuan bagi unit kerja di bawahnya dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ini antara lain memuat visi, misi, analisis perkembangan strategik, tujuan dan sasaran, serta penjabaran program kerja setiap Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang setiap tahun dalam periode pembangunan tahun 2019.

1.2. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan bidang pangan. Sedangkan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, sumberdaya, ketahanan pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan Bupati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Dinas, 5 (lima) Bidang, 30 (tiga puluh) UPTD dan Jabatan Fungsional, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

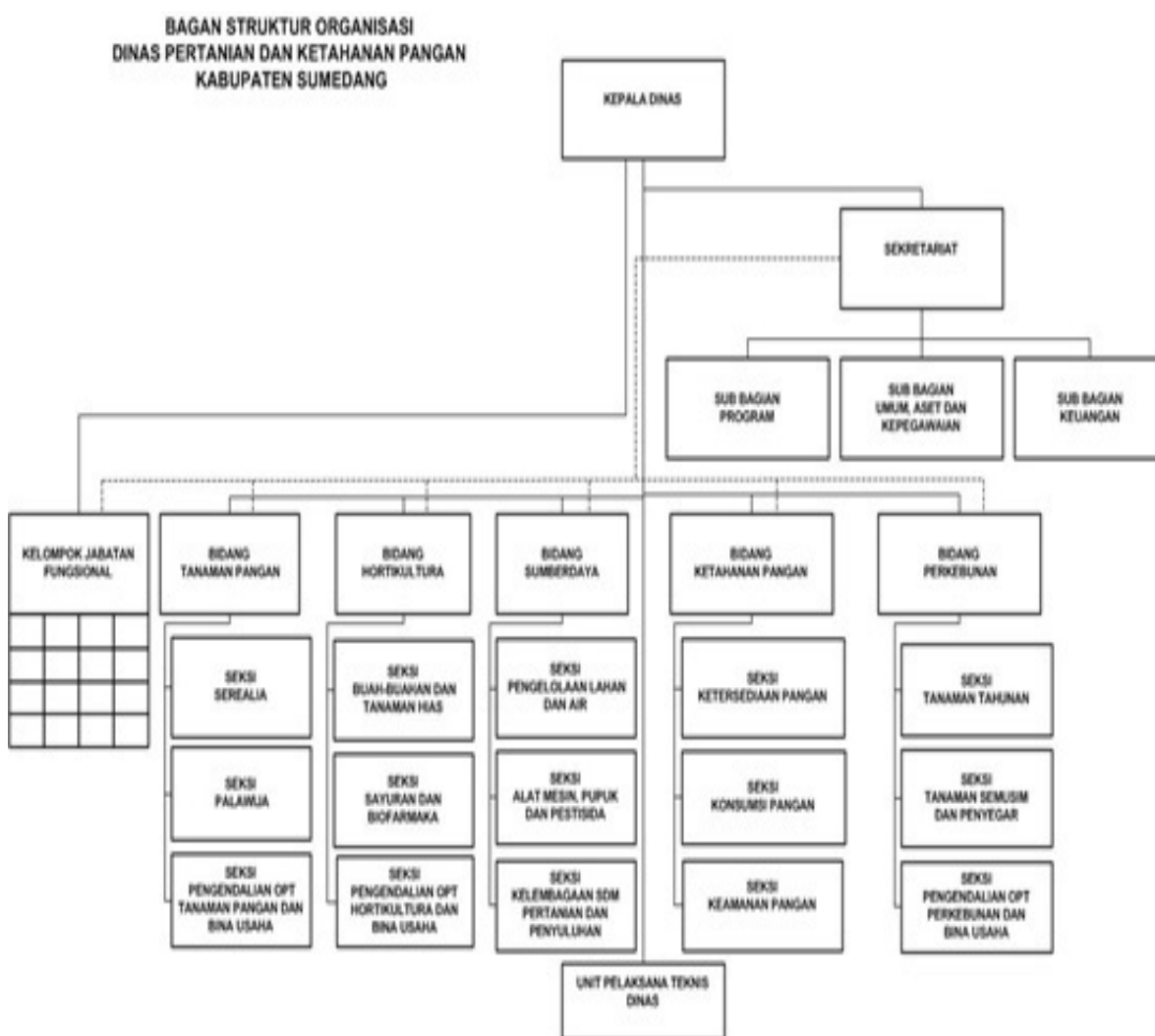
- a. Sekretariat Dinas membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- b. Setiap Bidang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - i. Bidang Tanaman Pangan membawahi Seksi Serealia, Seksi Palawija dan Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha.
 - ii. Bidang Hortikultura membawahi Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayuran dan Biofarmaka dan Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha.
 - iii. Bidang Perkebunan membawahi Seksi Tanaman Tahunan, Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar dan Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.
 - iv. Bidang Sumber Daya membawahi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida dan Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.
 - v. Bidang Ketahanan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Konsumsi Pangan dan Seksi Keamanan Pangan.
- c. UPT terdiri dari 26 UPTD Wilayah Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tersebar di 26 kecamatan dan 4 UPT Teknis, yaitu UPT Benih Padi dan Palawija Ujungjaya, UPT

Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong, UPT Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dan UPT Agrobisnis Tembakau.

d. Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Penyuluh Pertanian.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka pelaksanaan tugas pokok dilakukan oleh unit-unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut ini



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang didukung oleh 3 (tiga) Sub Bagian, 5 (lima) Bidang, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah (26 UPT, 26 Kecamatan), UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya, UPTD Benih Hortikultura dan Perbibitan Perkebunan Rancakalong, UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang, UPTD Agrobisnis Tembakau Tanjungsari dan Jabatan Fungsional. dan Susunan Organisasi Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum Asset dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
2. Bidang Sumber Daya Pertanian , membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - b. Seksi Alsin, Pupuk dan Pestisida
 - c. Seksi Kelembagaan SDM Pertanian dan Penyuluhan
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Serealia
 - b. Seksi Palawija
 - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Panagn dan Bina Usaha
4. Bidang Hortikultura, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Buah dan Tanaman Hias
 - b. Seksi Sayuran dan Biofarmaka
 - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan Bina Usaha
5. Bidang Perkebunan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Tanaman Tahunan
 - b. Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar

- c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Bina Usaha
6. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah (26 UPTD, 26 Kecamatan)
8. UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya
9. UPTD Benih Hortikultura dan Perbibitan Perkebunan Rancakalong
10. UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
11. UPTD Agrobisnis Tembakau Tanjungsari;
12. Jabatan Fungsional.

1.4. Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Telaahan nvisi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertical yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaa peran dan fungsi dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan 6 aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam tanaman pangan
- 2) Permasalahan dalam hortikultura

- 3) Permasalahan dalam perkebunan
- 4) Permasalahan dalam sumber daya pertanian
- 5) Permasalahan dalam ketahanan pangan
- 6) Permasalahan dalam secretariat dinas.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu strategis
1.	Bidang tanaman pangan	<p>1. Masih terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bemutu serta sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu dan produktifitas tanaman serelia dan palawija</p> <p>2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman (IP), perluasan areal tanam baru (PATB) dan peningkatan mutu intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam</p> <p>3. Masih tingginya kehilangan hasil akibat penanganan panen, serangan hama penyakit tanaman dan dampak pengaruh iklim</p> <p>4. Belum optimalnya penanganan paska panen komoditas tanaman pangan</p> <p>5. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka</p>	<p>1. Belum optimalnya produksi, produktifitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi lajun pertumbuhan ekonomi sector pertanian.</p>

		penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.	
2	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul bermutu 2. Belum terjadinya mutu produksi 3. Belum optimalnya produktifitas komoditas hortikultura 4. Masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan dampak pengaruh iklim serta penanganan paska panen 5. Belum optimalnya penyebaran informasi produk unggulan daerah. 	
3	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan 2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan 3. Belum optimalnya produktifitas komoditas perkebunan 4. Masih tingginya gangguan hama penyakit komoditas perkebunan 5. Masih rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam penanganan budidaya, penanganan paska panen dan pengelolaan hasil perkebunan. 	
4.	Bidang Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya secara optimal sarana prasarana infrastruktur baik kuantitas maupun kualitas 2. Belum ada regulasi tentang perlindungan lahan pertanian 	

		berkelanjutan, banyaknya pengembangan wilayah perumahan 3. Belum terpenuhinya secara optimal alat mesin pertanian baik kuantitas maupun kualitas untuk percepatan tanam, penanggulangan kekurangan tenaga kerja serta pengamanan produksi 4. Belum optimalnya kapasitas kerja alat pertanian 5. Tingginya resiko usaha tani yang mengakibatkan kegagalan panen 6. Penyaluran pupuk besubsidi masih belum memenuhi kaidah ENAM TEPAT (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat) 7. Masih rendahnya kualitas SDM petani 8. Masih rendahnya minat dan kesadaran petani untuk berkelompok 9. Masih rendahnya insentif dan disinsentif buruh tani, baik berupa sarana produksi, keterampilan sehingga kesejahteraan buruh tani masih rendah 10. Masih rendahnya dinamika kelembagaan tani 11. Belum dinamisnya kelembagaan penyuluhan petani 12. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja penyuluhan 13. Terbatasnya jumlah SDM	
--	--	--	--

		<p>penyuluh pertanian dan</p> <p>14. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.</p>	
5.	Bidang Ketahanan Pangan	<p>1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat</p> <p>2. Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah</p> <p>3. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan inport/ luar daerah</p> <p>4. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat</p> <p>5. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan pokok</p> <p>5. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan pokok</p> <p>6. Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan</p> <p>7. Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan dan</p> <p>8. Interpensi/ penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada dilokasi desa yang termasuk kategori miskin</p> <p>9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras</p> <p>10. Masih rendahnya konsumsi panganekaragaman pangan masyarakat</p>	<p>2. Belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi panganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan.</p>

		<p>11. Belum optimalnya kesarana konsumsi pangan masyarakat yang beragam, berigizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting)</p> <p>12. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang</p> <p>13. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal karna kurun waktu 2014-2018, focus pemanfaatan lahan untuk komoditas pajale</p> <p>14. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga</p> <p>15. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin, dan bakteri fatogen yang berbahaya bagi tubuh manusia</p> <p>16. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan produk pangan</p>	
6.	Sekretariat Dinas	<p>1. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi organisasi</p> <p>2. Kurang nya jumlah SDM aparatur</p>	

		<p>3. Amparatur profesionalitas SDM aparatur</p> <p>4. Belum optimalnya prosedur kerja yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik</p> <p>5. Belum optimalnya sarana teknologi dan informasi dan</p> <p>6. Belum adanya database yang filed untuk perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang.</p>	
--	--	--	--

Dari table diatas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek pemmasalahan dalam pelayanan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Isu belum optimalnya produksi, produktifitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sector pertanian

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip perkembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep-konsep pro poor, pro job pro environment dengan memperhatikan komuniti empowerment.

Berdasarkan data BPS, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada sector pertanian (khusus sub sector tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perkebunan) mengalami kenaikan, dari 2.824.204 5 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 3.039.118,6 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan pada tahun 2017 sektor pertanian di kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,61%. Jika di bandingkan

dengan pertumbuhan tahun sebelumnya berate lajunya mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sector pertanian, tnp di pengaruhi inflansi.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) srstruktur ekonomi Kabupaten Sumedang masih di dominasi oleh empat kategori lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan, industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan kontruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 20,33%. Nilai tersebut didominasi oleh peranan lapangan usaha pertanian dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar 16,22% dan sisanya dari sub sector perternakan,kehutanan dan perikanan.Hal yersebut menggambarkan struktur ekonomi kabupaten Sumedang masih tergantung terhadap kemampuan produksi dan nilai tambah sector pertanian terutama sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salagh sattu indicator mkro untuk melihat kinerja perekonomian real suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonimi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapngan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju partumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) sangat dinamis tetapi cenderung meningkat terutama tahun2017 pada sector pertanian 6,99% terutama sub sector tanaman pangan 10,04% tanaman hortikultura 3,2% dan perkebunan 4,12%.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa sector pertanian masih sangat potensial dikembangkan sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap setuktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sumedang.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sector pertanian karna permintaan hasil pertanian dari pasar local dan regional cukup besar.

Adapun hambatan dalam hal ini produksi, produktivitas dan mutu hasil dan nilai tambah hasil pertanian sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan muncul dari : ketersediaan sumber-sumber air dan sarana infrastuktur tingkat kesuburan lahan terbatasnya kepemilikan lahan alat mesin pertanian prapanen, panen dan paska panen penyediaan benih unggul pelayanan saprodik tingkat kehilangan hasil yang masih tinggi akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim penerapan teknologi produksi yang relative rendah standar teknis proses penanganan panen dan paska panen keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja petani jaminan asuransi usaha tani sistem tataniaga hasil pertanian dan relative panjang terbatasnya penyebaran informasi dan fasilitas informasi dan fasilitas promosi dan usaha tani kapasitas dan sarana pendukung penyuluhan pertanian belum efektif dan produktif dan pendapatan buruh tani masih rendah sebagai salah satu kantung kemiskinan disektor pertanian.

Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar Negri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sector pertanian adalah mendorong agribisnis adalah komoditas unggulan dengan meningkatkan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan dan penetrasu pasar, kerja sama dengan lembaga keuangan, inspector, dan sumber pembiayaan lainnya guna mengundang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktipikasi sektor pertanian. Dalam perpektif ke depan, strategi yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan pengguna teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri

pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan value added pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang.

2. Isu belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi penganekaragaman pangan dan belum tejaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan sehingga mempengaruhi pemantapan ketahanan pangan daerah.

Peluang pelayanan dibidang ketahanan pangan adalah Kabupaten Sumedang salah satu pemasok pangan utama di Jawa Barat, konsumen paling tinggi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, daya saing daerah yang mampu menarik investasi, daya tarik pariwisata agribisnis di Kabupaten Sumedang, dan potensi pengembangan wilayah agribisnis.

Adapun tantangannya adalah masih terfokus pada peningkatan produksi pangan belum mempertimbangkan kecukupan gizi tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi ubi-ubian, sayur, buah dan pangan hewani masih rendahnya konsumsi penganeka ragam pangan dan pemanfaatan pangan lokal terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi dan penetapan standar pangan yang semakin ketat.

Adapun hambatannya adalah adanya keterbatasan dalam penyediaan/ pengadaan cadangan pangan pemerintah. Peningkatan konsumsi beras terjadi karena meningkatnya rasio produksi padi di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi padi, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini di prediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak serdianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, Karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah padi (padi, jagung, kedelai). Sedangkan lahan pekarangan belum dimanfaatkan dengan optimal. Tidak seluruh Kecamatan mengajukan Desa yang termasuk kategori miskin tinggi (rawan pangan)

untuk mendapatkan intervensi/ penanganan rawan pangan. Alokasi intervensi/ penanganan Desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi Desa yang termasuk kategori miskin tinggi.

Sedangkan ancamannya adalah situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri termasuk Kabupaten Sumedang, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan.

Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor ketahanan pangan adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 jumlah penduduk Sumedang 1.146.435 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 0,38% dan hal ini akan mendorong pemerintah Kabupaten Sumedang pangan perkapita terus meningkat didukung bergesernya meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktifitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor nonpangan.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah perawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama perawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja DII. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita. Perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan dan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan

ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila diadaya gunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.

Untuk konsumsi pangan, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Pendukung ini juga merupakan agen pelaku usaha dibidang pangan yang menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Rekayasa Teknologi Informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang disusun diantaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.

Berdasarkan rubahan regulasi secara nasional khususnya permendagri nomor 5 tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Provinsi Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra. Sebelumnya, pelayanan ketahanan pangan akan focus pada isu-isu setrategis sebagai berikut :

1. Terfokus pada peningkatan produksi dengan mempertimbangkan pencukupan gizi
2. Menekan tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan meningkatkan konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani
3. Meningkatkan konsumsi penganeekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal

4. Ketersediaan pangan dalam mengantisipasi rawan bencana alam
5. Sektor pangan menjadikan usaha untuk penurunan kemiskinan dikantong-kantong daerah miskin yang rawan pangan (angka kemiskinan 9,76%,BPS bulan September 2018)
6. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting). Rawan pangan melibatkan banyak aspek seperti : Akses listrik, air, pendidikan (SD), pangan (stunting), akses jalan, roda empat, buta huruf serta kematian ibu melahirkan dan anak lahir.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pengembangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, Sistematika penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis 2014-2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Survei Kepuasan Masyarakat. Disajikan gambaran singkat tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran LKIP Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun yang lalu
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan kinerja beserta solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Bab 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan arahan RJPMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RJPMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”



Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang di sesuaikan dengan misi bupati terpilih. diarahkan ke misi nomor 3

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ditempuh menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Sumedang, kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi, nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terkait dengan Misi Ketiga RPJMD, yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal. Pada Misi Ketiga terdapat Tujuan yang terkait, yaitu Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata. Tujuan RPJMD tersebut didukung dengan Sasarannya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis dan Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka di dukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tujuan periode 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan”

Peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan sebagai salah bentuk untuk mewujudkan percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Sumedang. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa sub sektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketersediaan pangan diawali dengan hasil produksi pertanian yang melimpah dan mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. Pergerakan perkembangan produksi pertanian akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah pertanian dan ketahanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan sekaligus upaya mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran yaitu :

1. *Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Daerah;*
2. *Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.*

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 disajikan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PERIODE 2018-2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
						2019	2020	2021	2022	2023	
						Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan	Laju Pertumbuhan ekonomi			persen	
	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor :									
		a.Tanaman Pangan		Persen	10.04	10.14	0.24	10.34	10.45	10.55	10.55
		b.Tanaman Hortikultura		Persen	3.20	4.00	4.70	5.40	6.10	6.80	6.80
		c.Perkebunan		Persen	4.12	4.20	4.80	5.50	6.20	6.90	6.90
	Menjamin ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Persen	85	87.30	88.50	89.60	90.80	92.50	92.50

2.1.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

a. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan *good agriculture practices* (GAP);

3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;
4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;
6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);
8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
9. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.
10. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;
12. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
13. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;
14. Daerah rawan pangan (*stunting*) yang diintervensi;
15. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

b. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. Akses permodalan dari lembaga keuangan;
9. Meningkatkan ketersediaan pupuk;
10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen dan pasca panen;

11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian.
17. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
19. Penganekaragaman konsumsi pangan;
20. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas;
21. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
22. Kelembagaan dewan keamanan pangan;
23. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
24. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
25. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna;
26. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
27. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.

Selanjutnya struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUMEDANG 2018-2023**

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	1.3 Meningkatkan produksi komoditas unggulan daerah	Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis.
	1.4 Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.

**TABEL 2.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG 2018-2023**

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023		
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal		
TUJUAN : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan daerah	Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
	Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan <i>good agriculture practices</i> (GAP);	4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023		
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal		
TUJUAN : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;	5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;	6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;	7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 8. Akses permodalan dari lembaga keuangan; 9. Meningkatkan ketersediaan pupuk; 10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen dan pasca panen; 11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
	Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);	15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;	16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023		
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal		
TUJUAN : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.	17. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;	18. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;	19. Penganekaragaman konsumsi pangan; 20. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas; 21. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
	Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;	22. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
	Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;	23. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 24. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna; 25. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
	Daerah rawan pangan (<i>stunting</i>) yang diintervensi;	26. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.
	Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.	27. Kelembagaan dewan ketahanan pangan;

2.2 Indikator kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.4 INDIKATOR BIDANG URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PANGAN									
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan									
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	91,50	92,50	93,50	94,50	95,00	95,50	95,50
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PERTANIAN									
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan									
1	Jumlah produksi Tanamn pangan	Ton	740.732	815.842	899.384	992.381	1.096.085	1.211.722	1.211.722
2	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.333	157.386	164.783	173.682	184.276	196.807	196.807
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6.462	6.733	7.057	7.445	7.906	8.452	8.452
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									
1	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	5.752	6.052	6.352	6.652	6.952	7.252	7.252
2	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,35
3	Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	Km	62	77	92	107	122	137	137
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan									
1	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	120	138	157	179	206	206
2	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	48	53	58	63	68	73	73
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan									
1	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	teknologi/ penyuluh pertanian	3	6	9	12	15	18	18
2	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2.835	275	550	825	1.100	1.375	1.375
3	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-Kelas Pemula (skor 0-250)	Kelompok	767	762	757	752	746	739	739
	-Kelas Lanjut (skor 251-500)	Kelompok	1.405	1.406	1.407	1.408	1.410	1.413	1.413
	-Kelas Madya (skor 501-750)	Kelompok	68	71	74	77	80	83	83
	-Kelas Utama (skor 751-1000)	Kelompok	2	3	4	5	6	7	7

1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5 Target Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Urusan Pangan			
	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %
			Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	92,5 %
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan	100 %

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2019
1	2	3	4	5
2	Urusan Pertanian			
	Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	815.842%
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	157.186%
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	6.733%
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	6.052%
			Peningkatan Indeks Pertanaman (IP *)	1.95%
			Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	77%
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peningkatan Pelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	120%
			Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	53%
		Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	6%
			Penumbuhan Kelompok Tani Baru	275%
			Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	2.242%
			-Kelas Pemula (skor 0-250)	792%
			-Kelas Lanjut (skor 251-500)	1.406%
			-Kelas Madya (skor 501-750)	71%
		Kelas Utama (skor 751-1000)	3%	

2.4. Standar Kepuasan Masyarakat

Pada dasarnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Survey kepuasan masyarakat ini tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dikoordinir di UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan tiap wilayah kecamatan. Selain itu juga dilaksanakan di tingkat Kabupaten yaitu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat diadakan satu kali dalam masa satu tahun untuk Tahun 2019 ini. Hasil survey direkap dan di analisa di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Jl. Pangeran Kornel No. 307 Sumedang.

Responden dalam survey kali ini adalah pengguna layanan dari UPT maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari masyarakat umum maupun para petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayah Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah responden yang di sampel adalah sebanyak 241 orang.

Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai berikut:

Tabel 2.6 Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60- 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,523	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,524 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan isian responden pada kuesioner survey kepuasan masyarakat, maka dapat diperoleh jumlah nilai persepsi Unsur Pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan nilai persepsi pada masing-masing unsur pelayanan dari semua responden yang memberikan jawaban melalui kuesioner. Adapun jumlah nilai per unsur pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang paling besar adalah unsur pelayanan maklumat pelayanan dengan jumlah nilai mencapai 805 sedangkan yang terkecil unsur pelayanan Waktu Pelayanan yang mempunyai jumlah nilai terendah yaitu 637. Sehingga mencerminkan bahwa waktu pelayanan memerlukan perhatian dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dari hasil perhitungan didapat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 81,77, apabila dikonversi ke tabel konversi survey maka akan mendapatkan mutu belayanan B dengan kinerja Baik

2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya DALAM % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (x) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Guna mengetahui akuntabilitas kinerja maka pada pengukuran kinerja ini meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Hasil pengukuran Kinerja dan Analisis/ Evaluasi kinerja. Hal ini untuk mengetahui hal-hal apa saja yang telah mencapai hasil yang baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019.

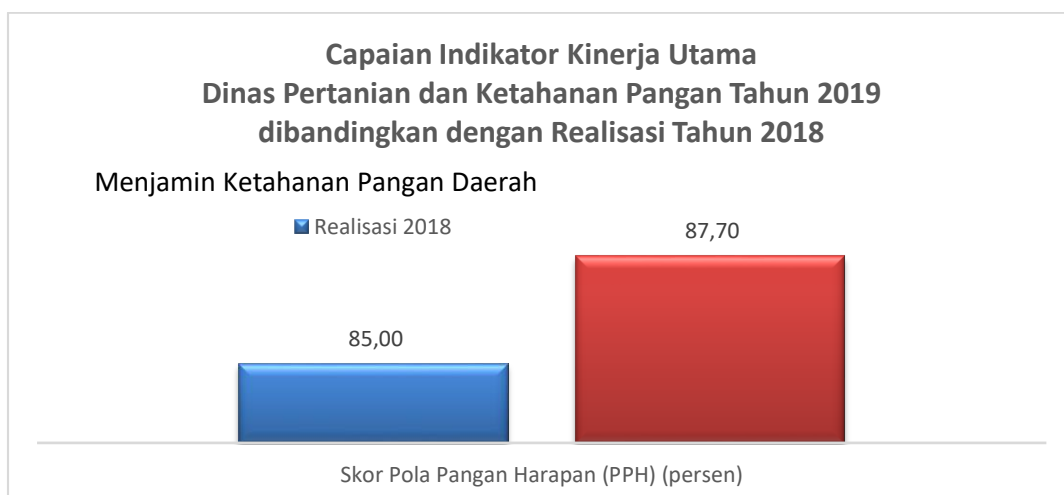
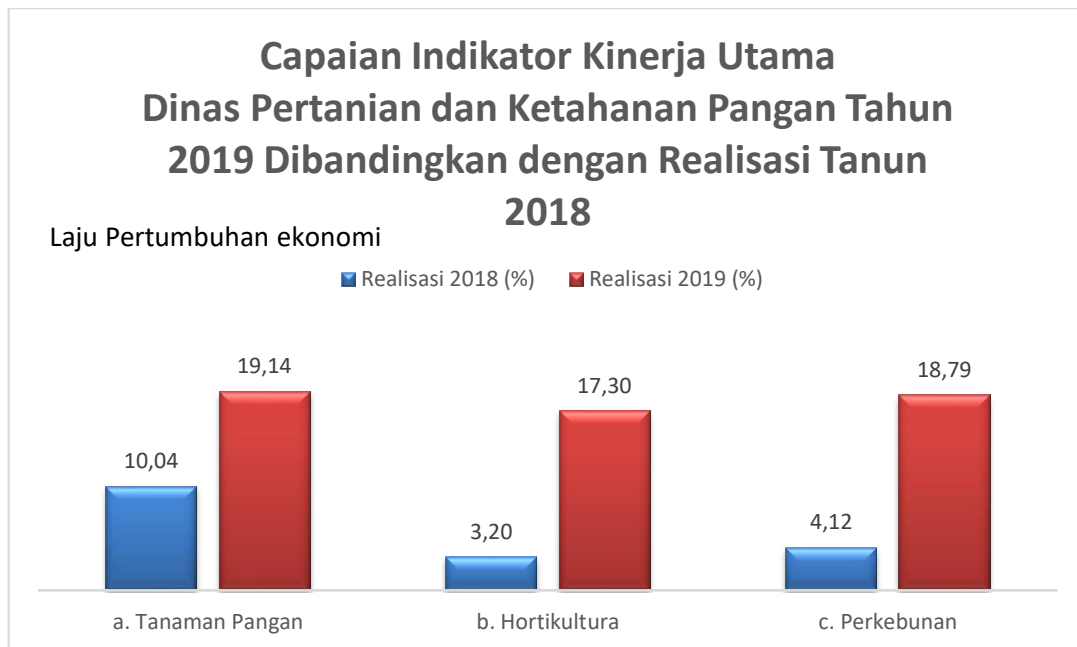
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan	Jumlah produksi tanaman pangan	815.842 ton	882.536 ton	108,17%
		Jumlah produksi tanaman hortikultura	157.386 ton	177.517 ton	112,79%

Agribisnis	Jumlah produksi tanaman perkebunan	6.733 ton	7.676 ton	114,01%	
	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	6.052 unit	6.025 unit	99,55%	
	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	1,95%	1,97%	101,03%	
	Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	77 km	77,25 km	100,32%	
	Jumlah peningkatan kelompok tani pengolah hasil pertanian	120 klp	129 klp	107,50%	
	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	53 dok	50 dok	94,34%	
	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	6 tek/penyulh	7 tek/penyulh	116,67%	
	Penumbuhan kelompok tani baru	275 klp	184 klp	66,91%	
	Jumlah peningkatan kemampuan kelas kelompok pelaksana kegiatan penyuluhan	2.242 klp	2664 klp	118,82%	
	- Kelas Pemula (skor 0-250)	762 klp	1312 klp	172,18%	
	- Kelas Lanjut (skor 251-500)	1406 klp	1287 klp	91,54%	
	- Kelas Madya (skor 501-750)	71 klp	69 klp	96,18%	
	- Kelas Pemula (skor 751-1000)	3 klp	2 klp	66,67%	
2	Menjamin ketahanan daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan energy dan protein per kapita	92.5%	92.5%	100%
		Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan	100%	100%	100%

PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2018 yang ditetapkan sebagai acuan dasar/angka awal penyusunan Perencanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 hasilnya sebagai berikut :

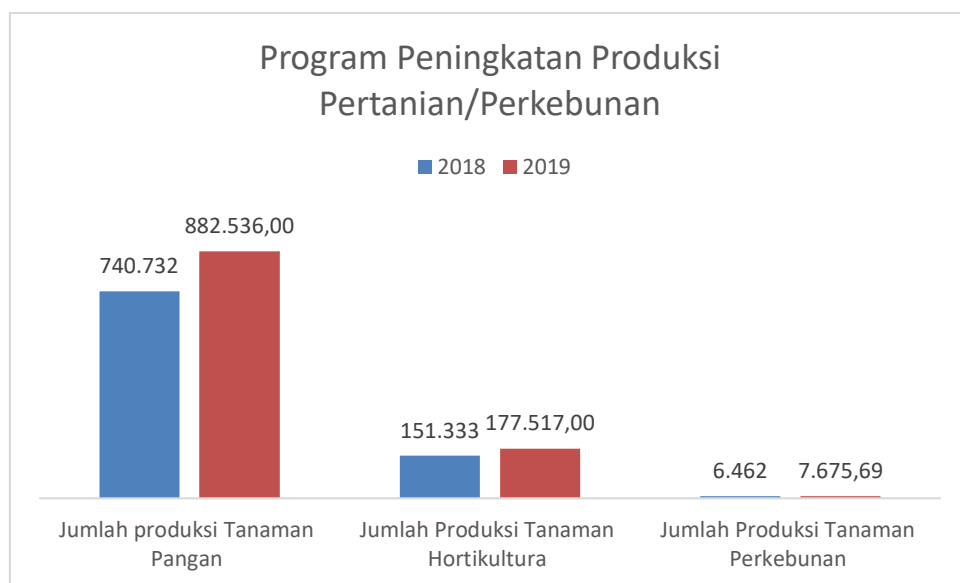
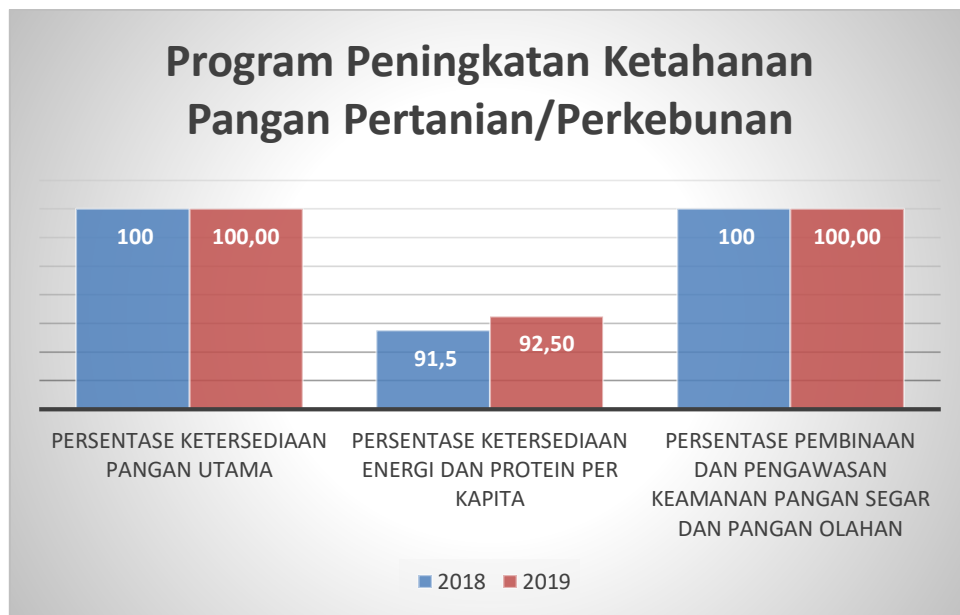
Grafik I . Capaian Indikator Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018



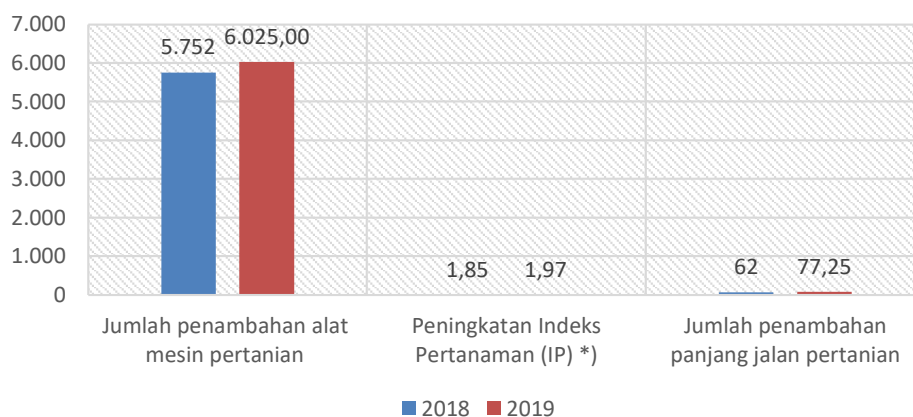
Terlihat dari grafik pada dasarnya capaian IKU relatif mengalami peningkatan.

Adapun tingkat Capaian Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 disajikan pada grafik berikut :

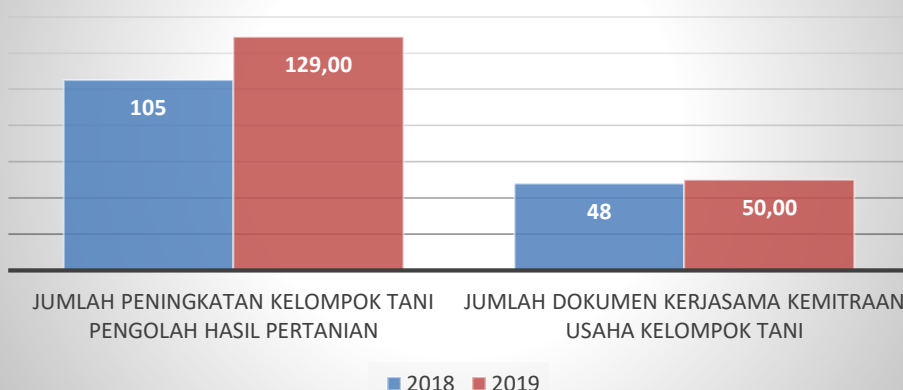
Grafik II . Capaian Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2018



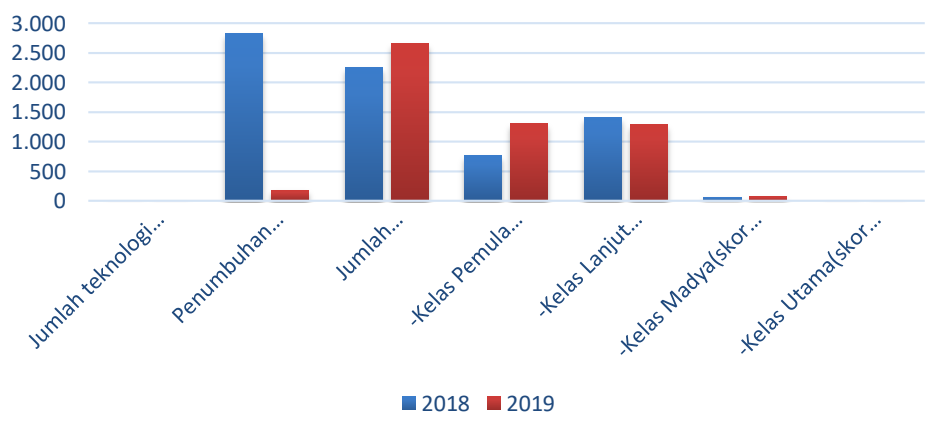
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan



Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan



Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan



Terlihat dari grafik tersebut perbandingan antara capaian Program Tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Untuk lebih detail hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)		Capaian Pada Akhir Tahun 2019		
				K	Satuan	K	%	
1	2	3	4	5		6		
1	URUSAN PANGAN		Indikator Kinerja	2018		2019		
	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100	Persen	100,00	100,00	
			Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	91,5	Persen	92,50	101,09	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan	100	Persen	100,00	100,00	
2	URUSAN PERTANIAN		Indikator Kinerja	2018		2019		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi Tanaman Pangan	740.732	ton	882.536,00	119,14	
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	151.333	ton	177.517,00	117,30	
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	6.462	ton	7.675,69	118,79	
			Indikator Kinerja	2018		2019		
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	5.752	unit	6.025,00	104,75	
			Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) *	1,85	persen	1,97	106,49	
			Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	62	km	77,25	124,60	
			Indikator Kinerja	2018		2019		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	105	Kelompok	129,00	122,86	
			Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	48	Dokumen	50,00	104,17	
			Indikator Kinerja	2018		2019		
		Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	3	teknologi per penyuluh pertanian	7,00	233,33	
			Penumbuhan Kelompok Tani Baru	2.835	Kelompok	184,00	6,49	
			Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	2.242	Kelompok	2.664,00	118,82	
			-Kelas Pemula (skor 0-250)	767	Kelompok	1.312	171,06	
			-Kelas Lanjut (skor 251-500)	1.405	Kelompok	1.287	91,60	
			-Kelas Madya (skor 501-750)	68	Kelompok	69	101,47	
			-Kelas Utama (skor 751-1000)	2	Kelompok	2	100,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								113,44

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam evaluasi perjanjian kinerja, sasaran strategis yang terdapat dalam rewiu Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A Sasaran 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan agribisnis :

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produksi Tanaman Pangan	ton	815.8	899.3	992.3	1.096.0	1.211.7	815.54	-	-	-	-
		42	84	81	85	22	2				
Jumlah produksi tanaman hortikultura	ton	157.3	164.7	173.6	184.276	196.807	157.38	-	-	-	-
		86	83	82			6				
Jumlah	ton	6.733	7.056	7.444	7.906	8.451	6.733	-	-	-	-

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
produksi tanaman perkebunan											
Jumlah penambahan alat, mesin pertanian	unit	6.052	6.352	6.652	6.952	7.252	6.052	-	-	-	-
Peningkatan indeks Pertanaman (IP)	persen	1.95	2.05	2.15	2.25	2.35	1,95	-	-	-	-
Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	km	77	92	107	122	137	77	-	-	-	-
Jumlah peningkatan kelompok tani pengolah hasil pertanian	Kelompok	206	120	138	157	179	120	-	-	-	-
Jumlah dokumen kerja sama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	53	58	63	68		53	-	-	-	-
Jumlah	Teknologi	18	6	9	12	15	6	-	-	-	-

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
teknologi pertanian yang di adopsi petani	ogi per penyuluhan pertanian										
Penumbuhan kelompok tani baru	Kelompok	1.375	275	550	825	1.100	275	-	-	-	-
Jumlah peningkatan kemampuan kelas kelompok pelaksanaan kegiatan penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	-	-	-	-
-Kelas pemula (skor 0-250)	Kelompok	739	762	757	752	746	762	-	-	-	-
-Kelas lanjut (skor 251-500)	Kelompok	1.413	1.406	1.407	1.408	1.410	1.406	-	-	-	-
-Kelas madya (skor 501-750)	Kelompok	83	71	74	77	80	71	-	-	-	-
Kelas utama (skor 751-	Kelompok	3	4	5	6	7	3	-	-	-	-

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1000)											

Sasaran 2 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah

Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketersediaan pangan utama	klpk	100	100	100	100	100	100				
Persentase ketersediaan energy dan protein per kapita	%	92,5	93,5	94,5	95,0	95,5	92,5				
Persentase pembinaan dan pengawasan kemandirian pangan segar dan pangan olahan	%	100	100	100	100	100	100				

3.3. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Analisis capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pertanian dan Urusan Pangan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

A. Bidang Urusan Pangan

Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terdiri dari satu program yang terdiri dari 7 kegiatan yang dikelola oleh Bidang Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja (%)
A	Urusan Ketahanan Pangan				
1.	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Input Jumlah dana yang tersedia	198.500.000,00	196.700.000,00	99,09
		Output Data/ Informasi bulanan pasokan dan harga pangan Pengembangan LPM, LDPM, dan PUPM Pengadaan gabah Mesin jahit karung	12 bulan 1 paket 20 ton 2 unit	12 bulan 1 paket 20 ton 2 unit	100
		Outcome Kontribusi Persentase Ketersediaan Pangan Utama	1%	1%	100
2.	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	261.250.000,00	52.600.000,00	20,13
		Output - Ketersediaan pangan utama (cadangan pangan pemerintah) - Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) - Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	- 19 Ton - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Tidak diserap - 1 Dokumen - 1 Dokumen	64.50
		Outcome Penanganan penduduk rawan pangan	19%	19 %	64.50
3.	Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	95.000.000,00	93.984.145	98,93
		Output Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA (Bergizi Berimbang Sehat dan Aman) Penyusunan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Promosi panganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	1 paket 1 dokumen 26 kwt	1 paket 1 dokumen 26 kwt	100

		Promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional	1 kwt	1 kwt	
		Outcome Peningkatan divertifikasi Pangan	10%	10%	100
4.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam Rangka Mendukung Program P2WKSS	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	38.000.000,00	36.367.500	95,70
		Output Pemanfaatan lahan pekarangan pangan	1 kwt	1 kwt	100
		Outcome Peningkatan divertifikasi pangan	1%	1%	100
5.	Pembangunan/ Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	1.000.000.000,00	974.664.800,00	97,47
		Output Lumbung pangan dan sarana pendukung	8 unit	8 unit	100
		Outcome Adanya Sarana Penunjang Ketersediaan Pangan Utama	10%	10%	100
6.	LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (Bantuan Provinsi)	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	5.000.000.000,00	4.771.038.346	95,42
		Output Pembangunan gudang LDPM	20 unit	20 unit	100
		Pengadaan gabah tringgiling	200 ton	200 ton	
		Pengadaan sarana untuk pengembangan E-Commerce	1 paket	1 paket	
		Outcome Meningkatnya kegiatan usaha per berasan kelompok tani/ kelompok LDPM	20 unit	20 unit	100
7.	Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi dan	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	1.000.000.000,00	903.101.750	90,31

Keamanan Pangan (Bantuan Provinsi)	Output			
	Penganekaragaman konsumsi pangan B2SA melalui kawasan rumah pangan lestari (LKRPL)	100 kwt	100 kwt	96,00
	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui lomba cipta menu (LCM) Pangan Lokal	26 kwt	26 kwt	
	Penyebaran informasi kewanaman pangan segar kepada masyarakat	1 kali	1 kali	
	Bimtek B2SA dan pelatihan KRPL serta pelatihan pengolahan	1 kali	1 kali	
	Outcome			
	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan kewanaman pangan	100 kwt	100 kwt	96,00

B. Bidang Urusan Pertanian

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 program yang terdiri dari 20 kegiatan yang dikelola oleh Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Sumberdaya yaitu sebagai berikut:

II. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja (%)
1.	Peningkatan kapasitas petani	Input	200.000.000,00	69.339.500	34,67
		Jumlah dana yang dibutuhkan			
		Output			59,50
		Penerapan teknologi Habibi Garden	1 paket	dibatalkan	
		Penerapan teknologi Smart Farming	1 paket	1 paket	
		Pelatihan petani	7 kelompok	7 kelompok	

		Outcome Meningkatnya produksi tanaman pangan	23 ton	23 ton	59,50
2.	Monitoroing dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	531.325.000,00	531.325.000,00	100
		Output Laporan evaluasi pembangunan pertanian	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan statistic bidang urusan Pertanian dan Pangan	12 bulan	12 bulan	
		Outcome Tersedianya data dan informas ipembangunan pertanian yang berkualitas dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100
3.	Penyusunan desain perencanaan prasara dan sarana infrastuktur pertanian	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	103.675.000,00	103.637.000,00	99,96
		Output Dokumen pra Action Plan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Peta kawasan Potensi Lahan Pembangunan Pertanian Berbasis Korkolasi	1 dokumen	1 dokumen	
		Outcome Tersedianya data dan informasipembangunan pertanian yang berkualitas dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	2 dokumen	2 dokumen	100
4.	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	Input Jumlah dana yang tersedia	274,106,000.00	260.900.000,00	95,18
		Output Sarana Produksi Tembakau	10 ha	10 ha	100
		Jumlah produksi tembakau	22 ton	22 ton	
		Outcome Peningkatan Jumlah produksi tembakau	22 ton	22 ton	100
5.	Pengembangan Sentra Pertanian Mangga Gedong Gincu dan Sawo Sukatali dalam Mendukung Pariwisata Jatigede (Bantuan Provinsi)	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	800.000.000,00	775.851.250,00	96,98
		Output Pengembangan areal manga gedong gincu dan sawo sukatali	50 ha (5.700 pohon)	50 ha (5.700 pohon)	100
		Fasilitasi sarana budidaya	1.500 kg	1.500 kg	

	(pupuk)				
	Fasilitasi sarana paska panen	2 paket	2 paket		
	SLGAP buah-buahan	4 kelompok	4 kelompok		
	SLGHP buah-buahan	2 kelompok	2 kelompok		
	Sosialisasi dan koordinasi teknis	6 kali	6 kali		
	Outcome Berkembangnya areal/kawasan sentra produksi manga gedong gincu dan sawo sukatali	50 ha	50 ha		100

III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja (%)
1.	Perlindungan lahan pertanian	Input	250.000.000,00	249.726.300,00	99,89
		Jumlah dana yang dibutuhkan			
		Output			100
		Jumlah laporan updating data perencanaan pembangunan sesuai RP2B	1 dokumen	1 dokumen	
		Peta potensi lahan pertanian	277 lembar	277 lembar	
		Dokumen potensi lahan pra LP2B	10 buah	10 buah	
2.	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK)	Input	2.982.174.000,00	2.966.864.000,00	99,49
		Jumlah dana yang dibutuhkan			
		Output			100
		Pembangunan irigasi air tanah Dangkal	4 unit	4 unit	
		Pembangunan irigasi air tanah dalam	1 unit	1 unit	
		Pembangunan embung	9 unit	9 unit	
Outcome			100		
Tersedianya data potensi lahan pertanian (pra LP2B)	1 dokumen	1 dokumen			

		parit	3 unit	3 unit	
		Luas lahan pertanian yang terair	425 ha	425 ha	
		Outcome Peningkatan indeks pertanaman (IP)	425 ha (0,48%)	425 ha (0,48%)	100
3.	Pengelolaan Sumber-sumber Air Irigasi Pertanian pada Usaha Tani Tembakau melalui Kegiatan Padat Karya	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	1.500.000.000,00	1.485.406.000,00	99,03
		Output Pembangunan jaringan Irigasi	14 unit	14 unit	100
		Luas lahan pertanian yang ter airi	310 ha	310 ha	
		Outcome Peningkatan indeks pertanaman (IP)	310 ha (0,35%)	310 ha (0,35%)	100
4.	Pengembangan dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi)	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	5.600.000.000,00	5.557.520.000,00	99,24
		Output Pembangunan/rehabilitasi jaringan Irigasi tersier (Jides)	30 unit	30 unit	100
		Pembangunan embung	2 unit	2 unit	
		Luas lahan pertanian yang terairi	800 ha	800 ha	
		Outcome Peningkatan indeks pertanaman (IP)	800 ha (0,9%)	800 ha (0,9%)	100
5.	Pengembangan dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Sumedang	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	5.000.000.000,00	4.788.282.500,00	95,77
		Output Pembangunan/rehabilitasi jaringan Irigasi tersier (Jides)	29 unit	29 unit	100
		Luas lahan pertanian yang terairi	725 ha	725 ha	
		Outcome Peningkatan indeks pertanaman (IP)	725 ha (0,81%)	725 ha (0,81%)	100
6.	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Input Jumlah dana yang tersedia	3.000.000.000,00	2.987.270.000,00	99,58
		Output Panjang Jala Usaha Tani (JUT) yang dibangun/ diperbaiki	5,4 km	5,4 km	100
		Outcome Tersedianya Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mendukung	5,4 km	5,4 km	100

		peningkatan produksi			
7.	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	6.285.000.000,00	5.775.278.000,00	91,89
		Output Pembangunan jalan usaha tani	8,6 km	8,6 km	100
		Pembangunan jalan produksi	0,5 km	0,5 km	
		Outcome Panjang Jalan pertanian yang tersedia untuk menunjang peningkatan produksi	9,1 km	9,1 km	100
8.	Pengelolaan Jalan Pertanian Usaha Tani Tembakau	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	1.005.217.000,00	998.789.000	99,36
		Outcome Panjang Jalan pertanian yang dibangun	0.75 km	0.75 km	100
		Outcome Jalan pertanian yang dibangun	0.75 km	0.75 km	100
9.	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	12.575.550.000,00	11.001.645.802,00	87,48
		Output Pembangunan damparit	6 Unit	6 Unit	100
		Pembangunan embung	2 Unit	2 Unit	
		Pembangunan jaringan irigasi per pipa	7 Unit	7 Unit	
		Pembangunan irigasi tersier	62 Unit	62 Unit	
		Pembangunan sumur air tanah dalam	1 Unit	1 Unit	
		Luas lahan pertanian yang terairi	1.540 ha	1.540 ha	
		Outcome Peningkatan indeks pertanaman (IP)	1,65%	1,65%	100

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

1.	Pengelolaan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi	Input Jumlah dana yang	150.000.000,00	149.272.500,00	99,52
----	---	----------------------------------	----------------	----------------	-------

	Tembakau	tersedia			
		Output Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT agri bisnis tembakau	1 paket	1 paket	100
		Outcome Mendukung pemasaran komoditas tembakau	100%	100%	100
2.	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kopi	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	275.894.000,00	255.381.500,00	92,57
		Output Jumlah kelompok tani perkebunan yang mendapatkan bantuan pemerintah Mesin pulper kopi Mesin huller kopi	8 kelompok 8 unit 1 unit	8 kelompok 8 unit 1 unit	100
		Outcome Jumlah kelompok petani perkebunan yang mendapatkan bantuan alat pengolah kopi	8 poktan pengolah kopi	8 poktan pengolah kopi	100

V. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1.	Fasilitasi pengembangan Pos penyuluhan Desa (POSLUHDES) (Bantuan Provinsi)	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	735.000.000,00	718.242.000,00	97,72
		Output Perangkat video konverence untuk Posluhdes Perangkat computer dan monitor Webcam Modem Video konverence Software Rembug tani Kursus tani Monitoring BIMTEK POSLUHDES Dukungan Teknis Pengoperasian Perangkat Video Konverence	21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 kali 21 kali 21 kali 1 kali 21 kali	21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 unit 21 kali 21 kali 21 kali 1 kali 21 kali	100
		Outcome Lancarnya pelaksanaan penyuluhan untuk	100%	100%	100

		mendukung peningkatan produksi pertanian/ perkebunan			
2.	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	1.488.542.000,00	1.388.065.700,00	93,25
		Output Pembangunan balai penyuluhan pertanian (BPP)	3 unit	3 unit	100
		Pengadaansarana pendukung BPP	1 paket	1 paket	
		Outcome Meningkatnya kapasitas penyuluh	100%	100%	100
3.	Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (BOP)	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	640.000.000,00	636.400.000,00	99,44
		Output Pembayaran BOP THL-TBBPD selama 12 bulan	57 orang	57 orang	99,44
		Pembayaran BOP THL-TBPP selama 12 bulan	48 orang	48 orang	
		Pembayaran BOP THL-POPT Selama 12 Bulan	26 orang	26 orang	
		Laporan Penyuluhan Pertanian- Perkebunan bulanan	180 dokumen	118 dokumen	
		Outcome Optimalnya kinerja THL TBPPD, THL TBPP, dan THL POPT	131 orang	1 org THL mengundurkan diri	99,44
4	BOP Penyuluh Pertanian PNS (Bantuan Provinsi)	Input Jumlah dana yang dibutuhkan	600.000.000,00	465.500.000,00	77,58
		Output Biaya operasional untuk penyuluh pertanian PNS	80 orang	77 orang	96,69
		Outcome Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya	80 orang	77 orang	96,69
		Outcome Lancarnya pelaksanaan penyuluhan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	100%	100%	100%

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran belanja program dan kegiatan pada Tahun 2019 menurut masing-masing urusan dengan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan
Tahun 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
	BELANJA LANGSUNG	54.254.993.500	52.755.048.127	97,24
A	URUSAN WAJIB SKPD			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.106.225.000	1.051.470.634	95,05
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	148.680.000	104.535.270	70,31
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.500.000	296.500.000	100,00
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.920.000	28.920.000	100,00
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	130.000.000	122.232.464	94,02
5	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	50.000.000	50.000.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	144.000.000	143.200.000	99,44
7	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD	214.625.000	212.932.900	99,21
8	Penyediaan Jasa Kebersihan	28.500.000	28.500.000	100,00
9	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat daerah	55.000.000	54.650.000	99,36
10	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	10.000.000	100,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.292.065.500	1.193.576.150	92,38
1	Pembangunan Gedung Kantor	284.900.000	205.283.000	72,05
2	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	219.845.500	212.954.500	96,87
3	Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	300.000.000	298.572.000	99,52
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	111.683.500	111.441.000	99,78
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	96.536.500	87.061.650	90,19
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	58.000.000	58.000.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	21.000.000	21.000.000	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	200.100.000	199.264.000	99,58
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.000.000	3.000.000	100,00
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	3.000.000	3.000.000	100,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98.098.000	97.473.000	99,36
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000	39.375.000	98,44
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	58.098.000	58.098.000	100,00
V	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.372.000	146.949.300	97,08
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	151.372.000	146.949.300	97,08
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	15.000.000	11.400.000	76,00
1	Pengelolaan Data Kepegawaian	15.000.000	11.400.000	76,00
	URUSAN PANGAN	7.592.750.000	7.028.456.541	92,57
VII	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	7.592.750.000	7.028.456.541	92,57
1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	198.500.000	196.700.500	99,09
2	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	261.250.000	52.600.000	20,13
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	95.000.000	93.984.145	98,93
4	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS	38.000.000	36.367.500	95,70
5	Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	1.000.000.000	974.664.800	97,47
6	Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Keamanan Pangan	1.000.000.000	903.101.750	93,12
7	LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	5.000.000.000	4.771.038.346	95,42
	URUSAN PILIHAN	43.996.483.000	41.164.716.052	93,56
	URUSAN PERTANIAN	43.996.483.000	41.164.716.052	93,56
VIII	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.909.106.000	1.471.052.70	87,60

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	(%)
1	Peningkatan Kapasitas Petani	200.000.000	69.339.500	34.67
2	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	531.325.000	531.325.000	100,00
3	Penyusunan Desain Perencanaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pertanian	103.675.000	103.637.000	99.96
4	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	274.106.000	260.900.000	95.18
5	Pembangunan Sentra Pertanian Mangga Gedong Gincu dan Sawo Sukatali dalam Mendukung Pariwisata Jatigede	800.000.000	775.851.250	96.98
IX	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	38.197.941.000	35.810.781.602	93.75
1	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK)	2.982.174.000	2.966.864.000	99.49
2	Pengelolaan Sumber-sumber Air dan Irigasi Pertanian pada Usaha Tani Tembakau melalui Kegiatan Padat Karya	1.500.000.000	1.485.406.000	99.03
3	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	6.285.000.000	5.775.278.000	91.89
4	Perlindungan Lahan Pertanian	250.000.000	249.726.300	99.89
5	Pengelolaan Jalan Pertanian Usaha Tani Tembakau	1.005.217.000	998.789.000	99.36
6	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	12.575.550.000	11.001.645.802	87.48
7	Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi)	5.600.000.000	5.557.520.000	99.24
8	Pengembangan dan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian di Kabupaten Sumedang	5.000.000.000	4.788.282.500	95.77
9	Pengembangan Jalan Usaha Tani	3.000.000.000	2.987.270.000	99.58
X	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	425.894.000	404.654.000	95.01
1	Pengelolaan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Tembakau	150.000.000	149.272.500	99.52
2	Penanganan Pasca Panen, Pengeolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kopi	275.894.000	255.381.500	92.57
XI	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	3.463.542.000	3.208.227.700	92.63
1	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	1.488.542.000	1.388.085.700	93.25
2	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Pertanian	640.000.000	636.400.000	99.44
3	BOP Penyuluh Pertanian PNS (Bantuan Provinsi)	600.000.000	465.500.000	77.58
4	Fasilitas Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) (Bantuan Povinsi)	735.000.000	718.242.000	97.72
	JUMLAH	54.254.993.500	52.755.048.127	97.24

Bab 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 ini telah berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Walaupun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2019 telah mencapai target sebesar 97,24 %.

4.2 Langkah-langkah peningkatan Kinerja

Ada beberapa langkah dengan pelaksanaan teknis kegiatan dan pelayanan masyarakat :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dan petugas teknis lapangan yang tersedia dengan peningkatan kualitas melalui pembinaan dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.
2. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen usahatani kepada para petani di Kabupaten Sumedang secara kontinyu.
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan pertanian.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap timbulnya serangan hama penyakit tanaman.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan

kinerja dan indikator kinerja, namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerjanya. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan melalui inovasi kinerja dari perencanaan , penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sehingga harapan dapat dicapai secara lebih maksimal

Sumedang, 3 Januari 2020

Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumedang



Ir. H. AMIM, MM

NIP. 19620909 199202 1 001